

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KOPERASI DAN UKM**  
**PUBLIKASI HARIAN**

**Senin, 25 Agustus 2025**

**Pertama**, Kadis bersama semua staf mengikuti apel kekuatan gabungan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan pembina apel gubernur NTT yang dalam arahannya menekankan beberapa kebijakan pemerintah saat ini termasuk pelaksanaan pameran pembangunan dan karnaval pembangunan dalam rangka HUT RI ke 80 dan rencana pelaksanaan Tour de EnTeTe dan pameran pembangunan dalam rangka HUT NTT Desember 2025.

**Kedua**, se usai apel kadis mengikuti rapat pimpinan, yang dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Dalam rapat tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur kembali menegaskan secara lebih detail kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dan beberapa rencana penyelenggaraan event. Gubernur dan Wakil Gubernur juga menekankan tentang loyalitas dan kepatuhan-kepatuhan dalam konteks sistem, seperti menghadiri undangan mendampingi gubernur dan wagub serta sekda, dan hal disiplin dan kepatuhan lainnya. Diharapkan setiap pimpinan OPD melakukan hal yang sama di lingkungan OPD masing-masing.

**Ketiga**, Kadis mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi NTT tentang penyampaian nota pengantar perubahan APBD 2025 oleh gubernur. Materi dari perubahan APBD tersebut kemudian disampaikan oleh setiap pimpinan OPD di lingkungannya agar diketahui oleh semua staf demi pelaksanaannya yang sebaik mungkin.

Kadis memimpin rapat dinas di ruang sekretariat diikuti oleh seluruh ASN Diskop UKM. Rapat tersebut membahas : **Pertama**, terkait dengan postur perubahan APBD yang baru disahkan oleh DPRD Prov NTT melalui rapat paripurna hari ini. Sampai dengan saat ini, realisasi pendapatan adalah sebesar 2,8T (55%) yang berarti capaian APBD juga belum maksimal sampai dengan saat ini. Angka 2,8T tersebut diperoleh dari PAD sebesar 781M, Pendapatan Transfer ke Daerah sebesar 1,8T dan sumber pendapatan lain yang sah sebesar 201M; **Kedua**, Kadis menegaskan tentang pembagian tugas kepada setiap ASN di Dinkop UKM harus jelas dan dicatat dengan baik oleh masing-masing Kabid/Kasubbag. Pada intinya semua ASN harus bekerja. Selanjutnya, Kadis juga menyampaikan

kendala surat kepada Kabupaten/Kota yang belum selesai hingga hari ini terkait pendataan potensi bidang usaha di masing-masing Kab/Kota; **Ketiga**, terkait Permendagri No. 13 Tahun 2025, bahwa setiap ASN harus membaca, memahami dan mengambil kesimpulan dimana posisi Pemprov NTT dalam penerapan Permen tersebut, khususnya peran Dinkop UKM Prov NTT; **Keempat**, terkait pelatihan yang akan diselenggarakan di Kota Kupang dan TTS, Kadis meminta bahwa pelatihan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan pemilihan narasumber yang baik (paham teori dan praktik langsung), peserta yang harus paham dengan materi yang disampaikan, sampai dengan memastikan bahwa pertanggung jawaban kegiatan harus diselesaikan pada hari yang sama saat penutupan kegiatan. Semua ini perlu dilakukan karena untuk memaksimalkan serapan anggaran yang sudah dialokasikan untuk dinas; **Kelima**, Kadis menyampaikan terkait kunjungan Dili International Expo yang mana akan menjadi peluang besar kerjasama antara NTT dan Timor Leste, termasuk di bidang koperasi dan UKM; **Keenam**, para PIC KDMP tetap harus bekerja walaupun proses launching sudah terlaksana. Para PIC harus memahami dan mengintegrasikan Permendagri No. 13 Tahun 2025 kepada masing-masing Kab/Kota yang menjadi tanggung jawabnya; **Ketujuh**, Kadis menyampaikan tentang pentingnya etika dan logika pemerintahan, bahwa etika dan logika tersebut harus kita praktikkan dalam pekerjaan sehari-hari kita sebagai ASN. Contohnya : menghadiri undangan, jika terpaksa tidak hadir maka harus dengan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan; ketika atasan belum pulang, maka staf juga tidak dianjurkan pulang terlebih dulu; harus jelas antara unsur komando dan staf; setiap ASN harus inovatif, dibuktikan dengan ide-ide untuk menyikapi keterbatasan anggaran.

**Keempat**, Kadis menghadiri rapat finalisasi *rundown* kunjungan kerja ke Dili International Expo yang dipimpin oleh Wakil Gubernur dan dihadiri oleh beberapa OPD terkait. Pelaksanaan kunjungan kerja mulai tanggal 27-30 Agustus 2025 dengan jumlah rombongan sebanyak 7 mobil. Dalam rapat tersebut Wagub menegaskan bahwa acara harus se-efektif mungkin, khususnya terkait kedisiplinan waktu; semua pimpinan OPD harus menyiapkan bahan yang memuat potensi-potensi kerjasama yang bisa diwujudkan, kadis pertanian membahas potensi kerjasama di bidang pertanian, kadis koperasi membahas potensi kerjasama di bidang koperasi, dll; serta setiap pimpinan OPD harus menguasai isu yang diangkatnya.



